

BAB V

ANALISIS STRUKTUR MIKRO: INTERAKTIVITAS WARGANET SAAT TERJADINYA KASUS PEMERKOSAAN

Analisis struktur mikro ditekankan pada analisis komponen struktural bahasa yang merupakan bagian terkecil dari suatu teks atau wacana. Variabel analisisnya adalah pengamatan terhadap aspek semantik (makna lokal), sintaksis (penataan kalimat), stilistik (pilihan diksi), dan retorik. Setiap komunikator memiliki pandangan yang berbeda ketika ia akan menuangkan ide menjadi teks atau wacana. Pemilihan komponen struktural wacana yang berbeda dari tiap individu menentukan corak dan struktur produksi wacana yang khas. Analisis semantik dalam wacana kritis adalah upaya menemukan makna lokal yang terdapat dalam teks.

Haryatmoko (2016: 85) mengemukakan makna lokal biasanya berfungsi sebagai cara menyeleksi yang sesuai dengan mental, pengetahuan, atau ideologi individu. Informasi ini akan mempengaruhi opini atau sikap penerima. Makna lokal biasanya membantu membentuk topik dan makna inilah yang paling diingat dan direproduksi penerima sehingga makna ini yang paling memiliki konsekuensi nyata. Pada struktur mikro akan membahas empat elemen yakni semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik. Berikut penjabarannya:

5.1 Semantik

Semantik dalam skema Van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal (*local meaning*), yaitu makna yang muncul dari hubungan antar kalimat hubungan antar proposisi, yang dapat menunjukkan makna tertentu dari suatu teks. Terdapat empat point yang dibahas dalam penelitian ini yakni latar, detil, maksud dan pra anggapan.

5.1.1 Latar

Latar merupakan elemen untuk mengetahui maksud yang ingin disampaikan. Unsur latar interaktivitas yang terjadi di warganet adalah ini adalah membahas tentang ketidaksetujuan warganet terhadap narasi yang diproduksi oleh @Gerindra soal kasus pemerkosaan. Hasil cuitan ini dalam beberapa hari

mendapat sorotan hingga menghasilkan puluhan balasan yang memicu tingginya interaktivitas, di mana terjadi adu pendapat dari banyak warganet yang tidak setuju dengan bagaimana Gerindra membalas cuitan soal respon terhadap kasus pemerkosaan dengan tidak empati.

Adapun, @Gerindra melalui wacana teks, membagikan pengetahuan (knowledge) serta opini dan sikap terkait posisi partai di kasus pemerkosaan ini. Bagi partai politik, ini bukanlah ranah partai untuk bisa menjatuhkan sanksi secara langsung dan cepat. Pada narasinya @Gerindra menyatakan melalui Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokman yang juga Anggota Komisi III DPR jangan mengaitkan anak anggota DPRD tersebut dengan partai yang dimotori oleh Prabowo Subianto. Sebab itu tidak ada kaitannya.

Partai Gerindra juga menyebutkan, demi keamanan dan kenyamanan pihak keluarga korban, jika keluarga merasa diintimidasi, ada baiknya pihak keluarga juga melaporkan hal ini kepada kepolisian. Apabila nanti dibuktikan oleh kepolisian bahwa pihak keluarga/orang tua tersangka terlibat dalam intimidasi tersebut, maka partai baru bisa menindaklanjuti hal ini dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada orang tuanya. Tapi, selama tidak dinyatakan bersalah atau terlibat, partai tidak bisa menindak orang tua tersangka.

Hasil cuitan tersebut pun dalam beberapa hari mendapat sorotan hingga menghasilkan ratusan balasan yang memicu tingginya interaktivitas, di mana terjadi adu pendapat dari banyak warganet yang tidak setuju dengan bagaimana cara @Gerindra menarasikan suatu kasus pemerkosaan. Bahkan di tiap balasan Gerindra pun mendapat rata-rata *likes* yang cukup tinggi, itu artinya kebanyakan publik yang menunjukkan ketertarikan akan sebuah topik dan memutuskan untuk terus memantau dan melihat informasi yang diberikan @Gerindra terkait kasus pemerkosaan tanpa terlibat dalam partisipasi yang lebih jauh.



Gambar 5.1 Teks yang diproduksi oleh @fadhlierlanda

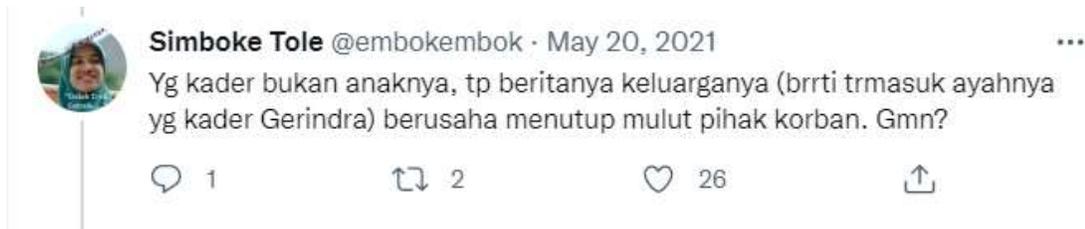
Akun @fadhlierlanda mencoba untuk membangun latar dengan opininya soal apa yang dilakukan oleh Gerindra adalah sebuah kejahatan. Idealnya, Gerindra punya sikap yang berpihak kepada korban dan mengawal korban untuk mendapatkan keadilan. Dia pun melakukan mention kepada @RahayuSaraswati, yang punya *branding* sebagai aktivis HAM dan perempuan.



Gambar 5.2 Teks yang diproduksi oleh warganet dan @Oparlupa

Adanya pemberitaan bahwa sang pelaku mangkir selama 2 kali dalam proses penyidikan, membuat warganet menjadikan sang kader sasaran, karena tentu sang orangtua punya andil dalam membela sang anak. Meski anaknya

bukan kader, tapi sang orang tua sudah melindungi anaknya yang merupakan pelaku pemerkosaan.



Gambar 5.3 Teks yang diproduksi oleh @embokembok

Akun @embokembok juga turut memberikan latar dalam wacana ini, bahwa berdasarkan pemberitaan ada sikap skeptis bahwa ada indikasi keterlibatan sang keluarga, sehingga warganet ingin mengetahui bagaimana peran partai dalam menyikapi kasus ini, di mana sang pelaku melakukan intimidasi dengan sejumlah uang.

5.1.2 Detil

Detil berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang (Eriyanto, 2009). Banyak warganet yang melakukan tindakan persuasi kepada warganet lain untuk tidak memilih Gerindra pada Pemilu 2024 setelah melihat bagaimana partai tersebut menangani kasus pemerkosaan.



Gambar 5.4 Teks yang diproduksi oleh @demozkratoz

Akun @demozkratoz mencuitkan “*Gimana mau ngatur rakyat kalau ngatur anak dan kader sendiri aja nggak bisa. Fix dah gua bakal meng-encourage kawan-kawan untuk gak milih nih partai,*” Adapun, Cambridge Dictionary mengartikan kata ‘*encourage*’ sebagai istilah mendorong atau menganjurkan. Lebih jelasnya lagi, ‘*encourage*’ adalah bentuk stimulasi sebuah aktivitas atau cara pandang untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

Dalam hal ini @demozkratoz akan memberikan stimulasi berupa dorongan pada lingkungan sekitarnya untuk tidak memilih partai Gerindra, sebagai bentuk konsekuensi yang harus diterima Gerindra atas sikapnya yang membingungkan masyarakat dan hal tersebut bisa berdampak negatif pada urusan kepemiluan mereka yang nantinya tidak mendapat banyak dukungan dari warganet akibat adanya kasus ini. Ucapan ini mengandung pemikiran bahwa dengan penguatan kualitas perilaku etis dan kapasitas penegakan etika pejabat publik melalui partai politik dapat menciptakan politisi yang berintegritas, apabila keberadaan partai politiknya sudah berintegritas, jika partai politik belum masuk dalam sistem integritas niscaya politisi yang dihasilkan oleh partai politik tersebut tidak berintegritas.



Gambar 5.5 Teks yang diproduksi oleh @Who_know_00 dan @lang_giii

Akun @Who_Knows00 juga seakan melakukan kontrol informasi dengan mengatakan bahwa kasus ini menjadi pengingat publik untuk tidak perlu percaya apa yang dikatakan oleh Gerindra, utamanya soal perlindungan perempuan dan kasus pemerkosaan. Lalu, pengguna @lang_giii ikut merespon dengan melakukan *quotes tweet* berupa cuitan Gerindra yang diunggah di Mei 2021 soal hak kesetaraan, perlindungan, kesejahteraan dan kesamaan dalam hak hidup. Hal tersebut menunjukkan Gerindra terkesan inkonsistensi dan punya standar ganda dalam membela beberapa kasus yang ada.

Kedua teks di atas, merupakan teks berjenis persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi unsur ajakan, imbauan, bujukan atau saran kepada pembaca. Persuasi mengutamakan emosi atau perasaan pembaca (Wijayanti, 2014:131) Hal tersebut dapat dibuktikan dengan isi teks yang diawali dengan pertanyaan yang mengajak pembaca untuk menempatkan imajinasi pembaca lalu mengikuti arahan yang ditulis soal apa yang dirasakan individu tersebut. Lalu dilanjutkan oleh kalimat kedua dan ketiga yang merupakan ajakan untuk melakukan kegiatan tertentu. Dalam kalimat kedua, pembaca pun akan diajak untuk melihat bahwa Gerindra hanya bersembunyi dibalik formalitas dalam

kasus pemerkosaan ini. Diakhiri oleh kalimat ketiga yang juga memberikan ajakan untuk tidak memberikan suara kepada Gerindra saat Pemilu 2024. Sedangkan, dalam akun @Who_Knows00 “*mudah-mudahan ini jadi pengingat publik,*” menurut Webster (2022), “*mudah-mudahan*” mengandung arti harapan, keinginan. Pemilik akun juga menaruh empati kepada warganet yang sudah percaya terlebih dahulu, namun ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Setelahnya, kalimat secara implisit terlihat bahwa pemilik akun @Who_Knows_00 mengimbau untuk warganet jangan asal percaya apa yang dicuitkan oleh Gerindra.



Gambar 5.6 Teks yang diproduksi oleh @narrygalooeng

Sedangkan, akun @narrygalloeng juga mencuitkan dengan tendensi yang sama soal stimulasi, “*kita tau kan kawan apa yang harus kita lakukan nanti*” adapun kalimat “*lakukan nanti*” bermaksud sudah adanya rencana untuk tidak memilih Gerindra atas *track record* yang terjadi. Bertumbuhnya pemahaman dan pendidikan politik masyarakat serta meningkatnya kesadaran politik masyarakat membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap politik dan partai politik. Masyarakat tidak mau sekedar ditempatkan sebagai massa pasif yang dimobilisasi atas kepentingan melainkan mendudukan diri sebagai massa aktif yang turut dalam menentukan arah dan dinamika politik. Akan tetapi sikap yang ditunjukkan oleh massa aktif merupakan representasi trauma politik berupa ketidakpercayaan terhadap partai politik.

5.1.3 Maksud

Maksud atau rasionalitas adalah kebenaran yang berfungsi untuk meletakkan dasar-dasar keinginan, sikap, dan kepercayaan yang telah ditentukan. Maksud yang disampaikan memiliki arti secara eksplisit. (Eriyanto, 2008).

Dalam hal ini, warganet menilai Gerindra sebagai partai yang tidak ada empati terhadap korban kekerasan seksual. Adapun, balasan balasan warganet pun tidak hanya sekadar melakukan balasan yang mengandung umpatan saja, tapi juga bermaksud memberikan anjuran sikap yang seharusnya dilakukan oleh partai politik Gerindra agar tidak terkesan blunder hingga mempengaruhi citra partai politik Gerindra itu sendiri.



Gambar 5.7 Teks yang diproduksi oleh @HendroJenn dan @AdeNursaadah

Pertama, ada akun @HendroJenn menyatakan, bahwa seharusnya Gerindra melakukan teguran, serta pendampingan untuk sang korban hingga tersangka tertangkap untuk diproses secara hukum sesuai UU dan KUHP. Cuitannya pun dibalas oleh @AdeNursaadah dengan nada persetujuan, seharusnya Gerindra mengawal kasus tersebut bukan dengan lepas tangan.

Warganet lainnya pun menyatakan bahwa tindakan ini merupakan langkah sayang sederhana bagi partai politik, sebab partai politik punya kewenangan untuk melakukan kontrol atas kader dan memberikan jaminan bahwa anggota fraksinya tidak menggunakan 'kekuasaan' untuk mempengaruhi berjalannya suatu proses hukum.



Gambar 5.8 Teks yang diproduksi oleh @tunggalp

Tweet yang punya interaktivitas paling tinggi datang dari Tunggal Pawestri dengan nama akun @tunggalp, menjelaskan kepada Gerindra bahwa seharusnya sikap yang lazim dilontarkan orang saat melihat kasus perkosaan adalah mengutuk perilaku tersebut kemudian diakhiri dengan statement mendukung RUU PKS agar kasus serupa tak terus-menerus menghantui perempuan Indonesia, bukan malah mencuitkan ketidakberpihakan pada korban. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kerja sama dengan menginformasikan prosedur proses hukum yang dijalani hingga tuntas, bukannya dengan langsung menyerahkan tanggung jawab pada kepolisian, sebab hal ini membuat partai terlihat lepas tangan. @tunggalp yang

memberikan usulan jawaban guna memperlihatkan pada Gerindra bagaimana seharusnya menjawab dengan penuh empati dan keberpihakan pada korban.

Kalimat *“Saya ajari cara jawabnya ya,”* menjadi satu *tweet* yang menganfung maksud untuk mengajari Gerindra. Bagi @tunggalp, penggunaan kata kunci berupa *“mengutuk pelaku kekerasan seksual dan mendukung keadilan bagi korban”* tentu sudah menggambarkan bahwa partai Gerindra melakukan dukungan moral pada korban bahwa kasusnya layak untuk didukung lewat proses hukum hingga tuntas. Dibanding harus mengatakan *“anaknya bukan kader, Kak,”* atau *“Semua kembali lagi kepada keluarga korban. Apakah ingin melanjutkan kasus ini secara hukum atau mengambil langkah atau pilihan lain,”* Di sini, partai harus menyadari betul kalau pemerkosaan seharusnya dihukum, dan tak akan selesai dengan pernyataan seperti *“kembali kepada keluarga”* bahkan jawaban seperti ini bisa dianggap sebagai upaya dekriminalisasi pada korban pemerkosaan.

Adanya kalimat *“kami pun mendorong disahkannya RUU PKS”* juga menjadi penanda bahwa Gerindra dapat bersikap empatif, tidak ada lagi alasan untuk tidak mendorong pengesahan RUU TPKS menjadi UU TPKS, melakukan investigasi pada kader, mengawal proses dan mendukung pemulihan korban sepenuhnya. Dengan aturan hukum yang jelas, para korban atau penyintas tindak kekerasan seksual akan mendapatkan penanganan yang tepat. Sementara itu, pelaku juga akan mendapatkan sanksi hukum yang setimpal agar tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Adapun *Tweet* @tunggalp pun mendapat interaksi sebanyak 2.218 *retweets* dan 4.000 *likes*.



Gambar 5.9 Teks yang diproduksi oleh @RodriChen

Lalu, pada *tweet* kedua dari @RodriChen, selain dirinya mengatakan bahwa sudah seharusnya Gerindra menempatkan kasus ini secara serius layaknya tindak pidana pemerkosaan anak, perdagangan perempuan dan anak. Hasil penelitian juga menemukan, bahwa dengan ia mengatakan *“terlepas tersangka punya hubungan apa dengan partai, admin akun parpol wajib punya daftar posisi partai di berbagai kasus,”* itu artinya meski bukan kader yang melakukan tapi sang anak, itu tetap harus menjadi perhatian penting bagi Gerindra untuk ditempatkan sebagai kasus besar partai, bukan dengan lepas tangan dan menjawab *“anaknya bukan kader”* kepada warganet. Tentu karena itu kejahatan anaknya kader maka partai tentu tak bisa sanksi kader itu. Seharusnya, meski anaknya bukan kader, alangkah baiknya partai merespon dengan mendorong aparat hukum untuk tindak pelaku kejahatan. Itu artinya Gerindra menunjukkan empati berupa sikap dan rasa untuk membayangkan bahwa mereka ialah korban atau orang terdekat dari korban yang ikut merasakan penderitaan perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan seksual.



Gambar 5.11 Teks yang diproduksi oleh @huftbosan

Kemudian, cuitan terakhir adalah milik @huftbosan juga seakan memberi saran bagaimana Gerindra seharusnya bersikap. “*jangan sampai unlawful*” artinya jangan sampai melanggar hukum dengan tidak memproses hukum dan tidak memberi keadilan pada korban. Maksud kata “*normatif*” yaitu tidaknya menyimpang dari hukum yang berlaku. Kalimat akhir soal “*mana ada pemerkosaan bisa damai*”, di mana, kasus pemerkosaan merupakan delik biasanya. Seandainya pengadu mencabut laporan atau berdamai sekalipun, tetap tidak menghentikan proses hukumnya. Putu (2022) penting bagi korban dan keluarganya untuk didampingi secara hukum dan psikologis agar tidak goyah memperjuangkan hak korban. Karena kasus-kasus serupa, upaya perdamaian hanya menguntungkan pelaku. Korban akan terus terzalimi akibat perbuatan pidana tersebut, bahkan setelah perdamaian.



Gambar 5.12 Teks yang diproduksi oleh @rdwica_

Menurut akun @rdwica_ pun pemerkosaan termasuk ke dalam delik biasa, bukan delik aduan. Dalam delik biasa perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban (anak) atau pelapor (istri dalam konteks pertanyaan Anda) telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Dari rumusan di atas di mana korbannya adalah perempuan di bawah umur, maka kalimat “*artinya mau damai, mau dinikahin (opsi sampah)*” menunjukkan bahwa kasus pemerkosaan tak akan selesai dengan pernikahan. Bagi @rdwica_ tweet Gerindra terkesan menyepelekan korban dan kasus pemerkosaan, apalagi adanya solusi pernikahan justru mengerdilkan kekerasan dan trauma yang dialami korban. Partai ini harus juga menyadari betul kalau perkosaan seharusnya dihukum, dan tak akan selesai dengan pernyataan seperti “*kembali kepada keluarga*”. Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Oleh karena pencabulan merupakan delik biasa, bukan delik aduan, maka proses perkara pencabulan tersebut tetap akan diproses, walaupun sudah ada pencabutan laporan dari si istri (pelapor), korban maupun keluarga korban.

Jadi, seharusnya polisi tetap memproses si tersangka meski si pelapor telah mencabut laporannya. Negara lewat perangkat hukum dan aparat penegak hukum merupakan aktor yang sangat penting karena memiliki kewenangan dan kemampuan dalam memberikan jaminan keamanan bagi korban. Kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam pelaporan kekerasan seksual, misalnya, harus tegas dalam menindaklanjuti laporan kasus. Mereka mesti menghindari memberikan saran agar korban berdamai—bahkan menikah dengan pelaku.

Bahkan, jalan pintas ini cenderung tidak memberi ruang dialog antara kedua pihak sehingga membungkam suara korban.

5.1.4 Praanggapan

Praanggapan adalah upaya mendukung pendapat dengan memberikan premis yang dipercaya kebenarannya (Jufri, 2008).



Gambar 5.13 Teks yang diproduksi oleh @DianOnno

Pertama, ada akun twitter @DianOnno yang memberikan cuitan. Melalui elemen praanggapan, pesan dapat dimaknai bahwa sebaiknya Gerindra tidak usah sekalian memberikan jawaban terkait pertanyaan dari warganet. Gerindra bisa saja bersikap diam dan mengabaikan pertanyaan-pertanyaan tentang kasus tersebut, daripada harus membuka topeng asli partai politik yang memang tidak berpihak pada korban dan tidak mencoba untuk memberikan rasa keadilan bagi korban. Gerindra terkesan hanya fokus beralih bahwa itu tidak dilakukan oleh anggota kader Gerindra bahkan terkesan *denial* dengan menyangkal peran mereka dalam melakukan hal tersebut. Menurut *A Theory of Image Restoration Strategies* dari Benoit, Gerindra telah melakukan *simple denial* yang merupakan penyangkalan sederhana, seperti ucapan kami tidak melakukan hal ini, atau dalam hal ini Gerindra mengucapkan “*pelaku bukan kader*” dan tidak menjanjikan apapun untuk membuat perubahan untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa.



Gambar 5.14 Teks yang diproduksi oleh @mazzini_gsp

Sosok @mazzini_gsp pun berasumsi melalui cuitan “*Jangan bilang kemaren nongol dipodkes ngomong kasus pelecehan, human trafficking blab bla bla karena ybs lagi momen ikut Pilkada Tangerang Selatan. Semoga aja gak. Tapi liat sikap partai gak ada dorongan samsek, wajar lah mikirnya gitu*”.

Hal ini Mazzini cuitkan setelah adanya bukti tayangan *podcast* dari Rahayu Saraswati yang membicarakan soal hak perempuan. “*Sikap partai gak ada dorongan sama sekali,*” artinya partai Gerindra dianggap tidak melakukan upaya apapun untuk mengawal kasus pemerkosaan sebagai suatu kasus yang diprioritaskan. Tentu, ini menjadi asumsi bahwa pada saat itu Rahayu hanya melakukan pencitraan, mengingat saat itu konteks waktunya berdekatan dengan pilkada Tangerang Selatan 2020 lalu.

Adapun praanggapan ini erat kaitannya dengan citra. Secara umum, citra adalah total persepsi terhadap suatu objek, yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Kamus Webster mendefinisikan citra sebagai gambaran mental atau konsep tentang sesuatu obyek. Sementara Kotler (2005) mendefinisikan citra sebagai jumlah dari keyakinan, gambaran, dan esan yang dimiliki seseorang pada suatu obyek. Obyek yang dimaksud bisa berupa orang, organisasi, kelompok orang, atau yang lainnya. Merujuk budaya masyarakat, terdapat dua bentuk sederhana dari citra, yaitu citra yang baik dan citra yang buruk. Citra yang baik dalam suatu

transaksi ekonomi dan politik, merupakan aset yang sangat berharga, karena ia bisa membangun dan membantu pilihan persepsi khalayak atas suatu produk.

Frank Jefkins dalam Masduki (2014) menyebutkan adanya lima jenis citra, yaitu: (1) *Mirror image* (citra bayangan). Citra ini melekat pada orang dalam atau anggota-anggota organisasi (biasanya adalah pemimpinnya) mengenai anggapan pihak luar tentang organisasinya. Dalam kalimat lain, citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar, terhadap organisasinya. Citra ini seringkali tidak tepat, bahkan hanya sekedar ilusi, sebagai akibat dari tidak memadainya informasi, pengetahuan ataupun pemahaman yang dimiliki oleh kalangan dalam organisasi itu mengenai pendapat atau pandangan pihak-pihak luar. (2) *Current image* (citra yang berlaku). Suatu citra atau pandangan yang dianut pihak luar atas suatu organisasi dan individu, yang ditentukan oleh banyak-sedikitnya informasi yang mereka terima, dikonstruksi oleh mereka dan dipercayai. Selanjutnya, (3) *Multiple image* (citra majemuk), yaitu adanya image yang bermacam-macam dari publik terhadap organisasi tertentu yang ditimbulkan oleh mereka yang mewakili organisasi dengan tingkah laku yang berbeda-beda atau tidak seirama dengan tujuan atau asas organisasi. (4) *Corporate image* (citra perusahaan), citra dari organisasi secara keseluruhan, bukan sekedar citra atas produk dan pelayanannya. (5) *Wish image* (citra yang di harapkan). Suatu citra yang diinginkan pihak manajemen atau suatu organisasi. Citra yang diharapkan biasanya dirumuskan dan diterapkan untuk gagasan atau merek yang baru, ketika khalayak belum memiliki informasi yang memadai mengenainya. Citra harapan ini bisa merupakan ciptaan baru atau transformasi dari citra lama yang dinilai kadaluarsa.

Sehingga, dalam kasus pemerksosaan ini, jenis citra yang melekat di Gerindra adalah *current image* (citra yang berlaku), yaitu suatu citra atau pandangan yang dianut pihak luar atas suatu organisasi dan individu, yang ditentukan oleh banyak-sedikitnya informasi yang mereka terima, dikonstruksi

oleh mereka dan dipercayai, di mana Gerindra dianggap hanya sibuk mengelak dan lupa untuk bersikap empati kepada korban.

Padahal, dalam situs partaigerindra.or.id di beberapa artikel beritanya sendiri menjelaskan bahwa semangat Gerindra yang dalam beberapa tahun terakhir cukup intens memberikan dukungan terhadap pengesahan RUU-PKS untuk memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih maksimal kepada para korban kekerasan seksual. dalam di berbagai kanal media sosial. Gerindra rutin membagikan konten bertajuk '*Suara Gerindra*' yang berisi pernyataan-pernyataan anggota-anggota legislatif Partai Gerindra dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di berbagai kasus, dari mulai bansos tunai, pendidikan tatap muka, kebocoran data penduduk, disiplin prokes, ketahanan pangan, dan kasus-kasus publik lainnya.



Gambar 5.15 Teks yang diproduksi oleh @meodroid

Kalimat dari pemilik akun @meodroid soal “*rendahnya kualitas isi partai Anda*” ini menjadi sebuah hal lumrah dalam sebuah *political market*, Susanto (2016) menjelaskan bahwa kader merupakan salah satu *product* yang menentukan daya jual partai di publik. Makin baik pola kaderisasi dalam tubuh sebuah partai, maka makin baik pula mutu *product* yang akan dihasilkan dan ditawarkan ke publik. Makin baik mutu *product* yang diajukan, maka makin tinggi juga daya jual partai tersebut dalam pemilu karena makin tingginya

keyakinan bahwa figur-figur yang akan dipilih merupakan kader-kader partai terbaik yang akan mampu mewakili kepentingan rakyat dan mengubah keadaan. Jadi kinerja sebuah partai politik, sangat ditentukan oleh kualitas kader-kadernya.

Dalam hal ini, warganet sudah mengetahui bahwa sang kader Gerindra adalah orang tua dari pelaku pemerkosaan, dan warganet tidak bisa melepaskan asumsi bahwa didikan orang tua berpengaruh pada tindakan sang anak. Tidak hanya itu, warganet pun telah menilai bahwa kualitas kader Gerindra sangat rendah, karena tidak taat oleh proses hukum untuk mengajukan diri dalam melakukan pemeriksaan atas kasus pemerkosaan yang terjadi.



Gambar 5.16 Teks yang diproduksi oleh @truck_fuso dan @cules0409

Sedangkan, akun Twitter @truck_fuso menyoroti dan menanyakan apakah gaji admin dari akun @Gerindra tidak sesuai, sehingga membuat kinerja dan mengganggu konsentrasi, hingga membuat admin menyalahkan perusahaan atau atasan yang memberi gaji. Sebab, balasan atas pemikiran admin Gerindra sangatlah buruk.

Bagi @truck_fuso, kader yang merupakan orang tua sang pelaku, tetap akan berpengaruh pada citra Gerindra. Hal ini juga disampaikan oleh @cules0409 bahwa anaknya kader merupakan keluarga besar Gerindra. Muchtar (2016) bahwa pilihan masyarakat terhadap partai politik tidak hanya ditentukan oleh kebesaran suatu partai, namun masyarakat akan lebih menilai kepada citra positif partai tersebut, eksistensi partai politik juga akan ditentukan dengan hubungan yang terus dibangun dengan masyarakat, sehingga kedekatan tersebut akan menumbuhkan kepercayaan konstituen. Di sini, peran para politikus sangat penting dalam pembentukan citra politik sebagai upaya menciptakan stabilitas sosial dengan memenuhi tuntutan rakyat. Politikus dan pemimpin partai politik berusaha menciptakan dan mempertahankan tindakan politik yang membangkitkan citra memuaskan, sehingga dukungan pendapat umum dapat diperoleh dari rakyat sebagai khalayak komunikasi politik yang akan menentukan pilihannya dalam setiap Pemilu mulai tingkat pusat sampai tingkat kabupaten dan kota.

Kepercayaan masyarakat terhadap suatu partai politik akan terbentuk manakala partai tersebut memiliki kemauan dan konsisten dalam menyuarakan aspirasi konstituen, yaitu membela kepentingan-kepentingan dasar dan kebutuhan dasar masyarakat. Bila upaya-upaya itu terus dilakukan, maka simpatisan akan terus mengalir dan tentu saja citra suatu partai politik akan meningkat.



Gambar 5.17 Teks yang diproduksi oleh @aldisetiawan96 dan @yooiihhh

Akun @aldisetiawan96 pun mengatakan sebaiknya Gerindra sebagai partai harus menghukum pelaku sebagai wujud keadilan. Secara praktik, seharusnya partai mampu melakukan konsolidasi organisasi secara cepat. Manajemen partai yang kokoh dan solid memastikan penanganan masalah mendapatkan perhatian khusus sehingga tidak memunculkan gejala yang berkepanjangan, kalimat “*kok malah terserah korban,*” menjadi sikap ketidakberpihakan pada korban.

Menurut *A Theory of Image Restoration Strategies* dari Benoit dalam Masduki (2014) tentang strategi pemulihan citra, hal tersebut termasuk *evading responsibility* (menghindari tanggungjawab). Ketika seseorang tidak dapat menyangkal melakukan perbuatan, organisasi mungkin mencoba untuk menghindar dari perbuatannya sendiri. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai lepas tanggung jawab atau menghindar tanggung jawab terhadap tindakannya tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tanggung jawab terhadap tindakan yang dimaksud. Dalam strategi menghindar tanggungjawab, aktor melakukan *defeasibility*, yakni aktor membuat alasan alasan atas faktor-faktor di luar kendali organisasi dan kurangnya pengetahuan atau kontrol tentang

faktor-faktor penting yang berhubungan dengan tindakan. Dalam hal ini, justru Gerindra melakukan blunder dan menunjukkan ketidaktahuannya dan kejadian ini tidak ada hubungannya dengan Gerindra karena sang anak bukanlah kader Gerindra.

Cuitan tersebut pun dibalas oleh akun @yoooihhh yang menyatakan asumsinya bahwa hampir semua politisi melakukan politik praktis. Adapun, pengertian dari politik praktis yakni sebuah dunia dikala semua itikad, motif, kepentingan, dan tekad, hadir beriringan dan saling berhimpit untuk memperebutkan kekuasaan. Secara kasat mata, kekuasaan yang dimaksud tidak lain merupakan jabatan, kedudukan atau posisi. Tetapi secara implisit, yang diperebutkan hakekatnya yaitu otoritas dan wewenang untuk membikin keputusan-keputusan publik.

Puput (2019) mengatakan politik praktis dianggap sebagai tindakan yang dapat menciderai demokrasi negara. Sebab dalam pelaksanaannya politik praktis dapat mengerahkan segala macam cara demi upaya agar memberikan pengaruh kepada para pemilih untuk dapat memilihnya. Misal, dalam kasus pemerkosaan ini kader Gerindra bahkan partainya tidak memberikan upaya apapun untuk menindaklanjuti kasus bahkan cenderung berkilah bahwa yang dilakukannya bukanlah dari anggota Gerindra. Akibatnya, citra seorang politisi sudah tercoreng maka tentu sudah pasti akan merugikan satu pihak secara keseluruhan, di mana satu kader Gerindra yang terseret kasus, membuat seluruh lembaga partai ikut tercoreng namanya.

Meskipun kesan teks tersebut masih menduga, namun teks tersebut dipercaya oleh beberapa warganet dan followers akun @Gerindra sendiri dengan mempertimbangkan beberapa cuitan @Gerindra sebelumnya, warganet pun sempat mendesak Gerindra untuk memberikan teguran kepada kader Gerindra yang merupakan orang tua dari pelaku pemerkosaan, AT (21). Beragam komentar dicuitkan, di mana warganet menyebut bahwa adanya kekuasaan dari orang tua sang pelaku, membuat proses hukum berjalan dengan sangat lambat.



Gambar 5.18 Teks yang diproduksi oleh @Who_knows_00 dan @lang_gii

Salah satu pengguna akun @Who_Knows00 yang mengatakan bahwa kasus ini menjadi pengingat publik untuk tidak perlu percaya apa yang dikatakan oleh Gerindra, utamanya soal perlindungan perempuan dan kasus pemerkosaan dan secara cepat pengguna @lang_giii ikut merespon dengan melakukan quotes tweet berupa cuitan Gerindra yang diunggah di Mei 2021 dengan soal hak kesetaraan, perlindungan, kesejahteraan dan kesamaan dalam hak hidup. Hal tersebut menunjukkan Gerindra terkesan inkonsistensi dan punya standar ganda dalam membela beberapa kasus yang ada. Dalam hal ini, banyak warganet yang saling membalas cuitan, meski mereka tidak saling

kenal, bahkan di tiap unggahan rata-rata mendapatkan 10 likes dan 20 retweet, sehingga bisa dikatakan bahwa interaktivitas yang terjadi cukup tinggi.

Banyaknya prasangka yang mengatakan bahwa sang orangtua terlibat, mengingat pelaku sempat mangkir dua kali. Di mana, AT sebagai pelaku masih dalam satu atap rumah. Sehingga, besar kemungkinan dirinya mendapatkan pengawasan dari orang tuanya. Banyaknya warganet yang merespons melalui fitur reply, menjadikan interaktivitasnya punya hasil yang sangat tinggi. Diketahui, dalam 1 hari, bisa menghasilkan 400 tweets balasan. Menariknya, peneliti menemukan, tiap warganet yang saling berinteraksi seakan spontan membalas, di mana pada kenyataannya mereka tidak saling mengenal.

Meskipun kesan teks tersebut masih menduga, namun teks tersebut dipercaya oleh beberapa warganet dan *followers* akun @Gerindra sendiri dengan mempertimbangkan beberapa cuitan @Gerindra sebelumnya, di mana warganet sempat mendesak Gerindra untuk memberikan teguran kepada kader Gerindra yang merupakan orang tua dari pelaku pemerkosaan, AT (21) sebab orang tua terkesan melindungi dan tidak menyerahkan sang anak kepada polisi. Namun, alih-alih menjawabnya dengan jawaban jelas yang berisi keterangan dan di mana posisi Gerindra pada permasalahan tersebut, malah @Gerindra menjawab dengan kalimat “*Siap, Bang Jago*”. Menurut pengamatan peneliti, memang dalam setiap debat di Twitter atau di media sosial mana pun, jarang sekali berujung baik. Tidak ada yang berusaha memahami kritik satu sama lain. Dalam perdebatan, jurus “*Siap, Bang Jago*” selalu menjadi pilihan yang digunakan untuk menanggapi kritik. Bahkan, kalimat ini menjadi kalimat akhir untuk mengakhiri sebuah perdebatan. Keseluruhan kalimat tersebut makin memperkuat pra anggapan bahwa @Gerindra di mata warganet adalah sosok partai politik yang miskin empati dan anti kritik.

5.2 Sintaksis

Sintaksis merupakan bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa dan frase. Pada konteks ini menampilkan bagaimana pembuat teks menggunakan kalimat hingga menjadi satu kesatuan. Terdapat tiga poin pada elemen sintaktis yakni koherensi, bentuk kalimat dan kata ganti.

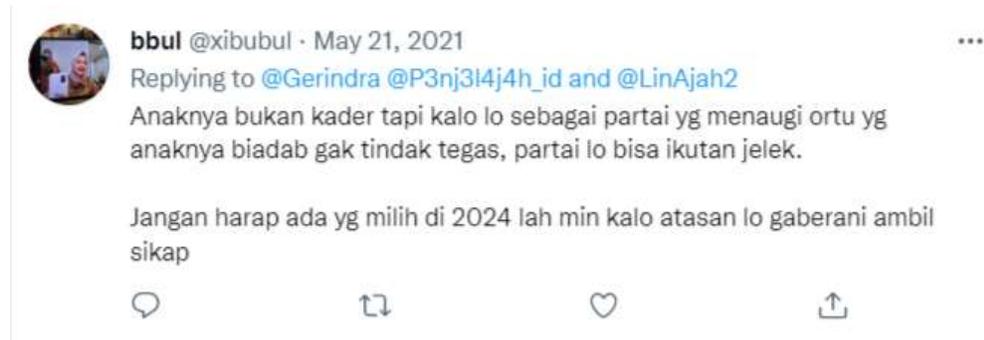
5.2.1 Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat yang dimaksud disini adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat, serta intonasinya menunjukkan bahwa ujaran tersebut sudah lengkap beserta maknanya, (Finoza, 2005). Bentuk kalimat yang mendominasi pada interaktivitas adalah struktur kalimat majemuk yang punya relasi makna pertentangan



Gambar 5.19 Teks yang diproduksi oleh @mazzini_gsp

Misalnya, tweet dari @mazzini_gsp “padahal di partai @Gerindra ada orang macam Rahayu yang ber-image lantang soal kasus pelecehan. **Tapi**, pas kelakuan begitu menimpa keluarga salah satu kader Gerindra kok sikapnya malah terkesan berbalik, ya”



Gambar 5.20 Teks yang diproduksi oleh @xibubul

Tak hanya itu, pemilik akun @xibubul juga mencuitkan bentuk kalimat seupa, “*anaknya bukan kader. **Tapi**, kalo lo sebagai partai yang menaungi ortu yang anaknya biadab gak tindak tegas, partai lo bisa ikutan jelek,*”

Dari kedua cuitan tersebut, meski tiap kasus merupakan tanggung jawab masing-masing pribadi, namun untuk kasus yang secara tidak langsung melibatkan kader tetap saja mempengaruhi elektabilitas partai. Setiap partai politik (parpol) memegang tanggung jawab besar untuk memastikan kader-kadernya mengedepankan etika politik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Gerry Ferguson, *Corruption and Criminal Liability* dalam *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana* (2014) menjelaskan bahwa pemikiran dan perilaku dari kader bisa menjadi cerminan dari proses kaderisasi partai politik yang berjalan di Indonesia.

Kedua cuitan di atas sebagai contoh bagaimana kalimat majemuk setara yang punya relasi makna pertentangan mendominasi interaksi warganet.

Masfufah (2021) menyebut bahwa apabila klausa bawahannya atau klausa keduanya menyatakan sesuatu yang bertentangan atau berlawanan terhadap pernyataan pada klausa inti atau klausa pertamanya. Adapun ciri khas dari kalimat majemuk setara pertentangan yaitu dengan penggunaan konjungsi **“tetapi”**.

Adapun, alasan mengapa bentuk kalimat majemuk setara pertentangan bisa mendominasi interaksi, sebab jawaban admin Gerindra atas kasus pemerkosaan yang melibatkan anak salah satu kadernya itu menjadi antitesis dari konten-konten Gerindra yang memuat program aksi yang ada di Gerindra. Hal ini pun membuat kepercayaan warganet menurun, hingga para warganet secara spontan mendokumentasikan arsip lama berupa cuitan sebelumnya, program kerja atau bahkan pidato tokoh untuk dikomparasikan dengan sikap Gerindra saat ini dalam memandang kasus pemerkosaan, dan hal tersebut secara otomatis banyak yang bertentangan.

5.2.2 Koherensi

Koherensi merupakan hubungan yang logis antar kalimat dalam satu paragraf (Depdikbud, 2003). Hanafiah (2014) menjelaskan bahwa koherensi mengacu pada aspek berupa unsur batiniah (makna, konsep dan pengetahuan) yang memerlukan interpretasi, maka koherensi dapat terjadi secara implisit. Dengan menyimpulkan hubungan antar proposisi dalam sebuah wacana, maka hubungan koherensi dapat dipahami.



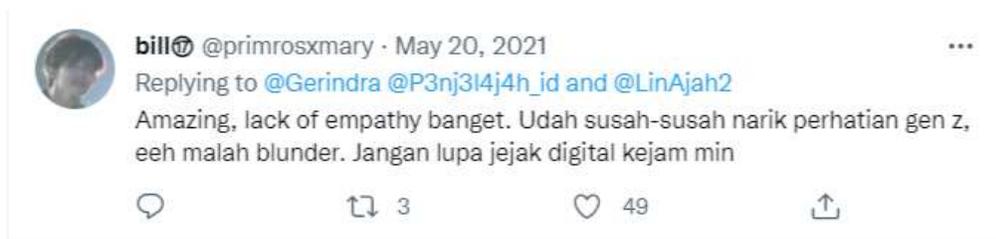
Gambar 5.21 Teks yang diproduksi oleh @just_iyah

Tweet pertama dari @just_iyah punya maksud bahwa partai politik sejak dahulu memang selalu terkenal meminta dukungan rakyat yang bertujuan untuk membawa pemimpinya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapat keuntungan dari dukungan tersebut. Seharusnya, hubungan ideal antara rakyat dan partai politik adalah simbiosis mutualisme. Namun, hal tersebut terjadi sebaliknya, di mana Gerindra yang dahulu minta dukungan rakyat, kini tidak melakukan timbal balik atas suatu permasalahan yang menimpa rakyatnya. Bahkan, secara jelas Gerindra menyebutkan kalimat “*bukan ranah partai*”, yang dimaknai bahwa kasus pemerkosaan bukanlah bagian dari kepentingan partai. Lalu, kata “*oooooh*” seakan mengisyaratkan bahwa @just_iyah paham soal logika Gerindra dan ia pun mengaitkan pada kasus pemilihan dengan menekankan bahwa salah bersikap untuk urusan perkosaan bisa membuat mereka rugi secara elektoral.



Gambar 5.22 Teks yang diproduksi oleh @soontoberichest

Tweet kedua dari @soontoberichest melakukan protes dengan mendesak Gerindra untuk menindak kader sebab melakukan kesalahan fatal. Hal ini peneliti artikan bahwa adanya kekecewaan dari warganet sebab tidak adanya respon atas protes tersebut soal kader yang merupakan orang tua dari pelaku juga punya andil dalam menyembunyikan AT (21). Kemudian, adanya kalimat “*nanti gerindra didoain ga dapet suara pemilu 2024*” maksudnya apabila Gerindra tidak melakukan tindakan apapun, maka Gerindra harus menerima konsekuensi yang bisa berdampak negatif pada urusan kepemiluan mereka, di mana warganet tidak memberi dukungan pada partai ini.



Gambar 5.23 Teks yang diproduksi oleh @primrosxmary

Terakhir adalah akun @primrosxmary yang menyebutkan, bahwa upaya Gerindra menarik perhatian generasi Z selama ini, seakan sirna akibat blunder yang dilakukannya. Kalimat “*eeh malah blunder*” ini seakan menjadi penanda bahwa usaha yang selama ini dilakukan tidak sesuai dengan harapan, bahkan kini warganet mengalami krisis kepercayaan publik di media sosial, apalagi dengan banyaknya cuitan berupa peringatan soal ‘jejak digital’ yang membuat warganet tidak lupa sekaligus bisa diangkat ke kasus Pemilu 2024 yang jadi pertimbangan publik. Adapun, beberapa tweet di atas memang menjadi contoh postingan yang mendapat interaktivitas hingga 50 likes.

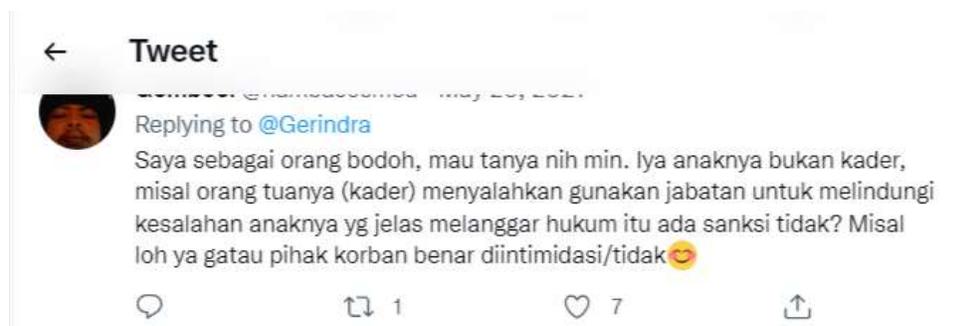
5.2.3 Kata Ganti

Kata ganti/pronominal merupakan kata yang dipakai untuk mengacu ke nomina lain (Depdikbud, 2003). Untuk interaktivitas warganet, pronomina persona atau kata ganti orang yang digunakan cenderung adalah dalam bahasa Indonesia “gaul”, di mana pronomina pertama menggunakan kata “gue” sedangkan untuk pronomina kedua menggunakan kata ganti “lo”



Gambar 5.23 Teks yang diproduksi oleh @susirawatilie, @mantangoblog_, @NGHTERK8, dan @susidawa

Misalnya, ini terlihat dari akun @susirawatilie dan @NGHTERK8 yang turut mengomentari dengan menggunakan bentuk “*gue*”, meski sang pelaku bukanlah kader, tapi seharusnya Gerindra menunjukkan empati dan membantu pihak berwajib supaya bisa ditangkap dan diadili. *Tweet* pertama punya pronomina persona pertama dan kedua, di mana dia menempatkan dan menyuarakan posisinya lewat bentuk “*gue*”, sedangkan Gerindra menjadi pronomina persona kedua dengan bentuk “*lo*”. Sudah terlihat dari ketikannya, bahwa pemilik akun @susirawatilie sangat marah besar apa atas cuitan yang Gerindra buat.



Sedangkan, cuitan @yugi_anwar menggunakan bentuk “*saya*”, “untuk menanyakan di mana posisi Gerindra, ketika seorang kader melindungi kesalahan anaknya yang jelas melanggar hukum itu ada sanksi tidak. Adapun, cuitan dari @yugi_anwar menempatkan subjek “*saya*” untuk mewakili dirinya, dia memposisikan sebagai orang bodoh, di mana dirinya memberikan asumsi bahwa dia tidak tahu apa-apa dan murni bertanya tanpa memberikan tuduhan apapun.

Tweet terakhir dari @susidawa, kata ganti “gw” yang digunakan oleh pembuat teks untuk menunjukkan di mana posisi seseorang dalam wacana mencerminkan posisi admin yang seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. Prayogi (2013) menjelaskan, terlepas dari bentuk gue/lo adalah pronomina betawi. Tapi, apabila digunakan dalam bahasa Indonesia, maka menurut tingkat kesopanan, di antara saya, aku dan gue, secara peringkat, kata saya merupakan yang pertama, dkasussul aku, lalu gue sebagai bentuk yang lebih kasar. Bahkan bentuk “lo” dalam percakapan muncul.

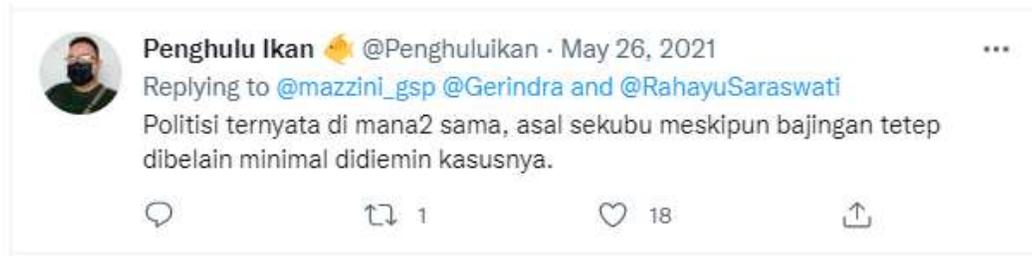


Gambar 5.24 Teks yang diproduksi oleh @MallorySianturi

Sementara itu, peneliti juga menemukan adanya kalimat “ente” yang ditunjukkan untuk Gerindra. adapun dalam bahasa Arab “Anta” yang diserap menjadi Ente memiliki makna tetap tanpa ada perubahan, meskipun adanya perubahan morfem yang sangat nampak, Anta dan Ente berarti “kamu” untuk kata ganti laki-laki tunggal “ente” ke dalam tuturan bahasa Indonesia yang artinya kamu. Dalam hal ini, penggunaan kata “ente” oleh warganet digunakan dalam keadaan emosi

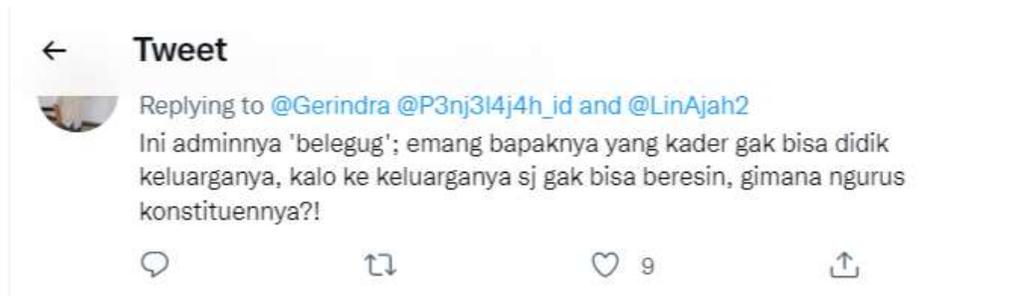
5.3 Stilistik (Leksikon)

Pada bagian stilistik hanya memiliki satu pembahasan yakni leksikon. Elemen ini menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia.



Gambar 5.25 Teks yang diproduksi oleh @PENGhuluikan

Seperti yang ada di akun @PENGhuluikan, “*Politisi ternyata di mana-mana sama, asal sekubu meskipun bajingan tetep dibelain minimal didiemin kasusnya,*” Di mana, @PENGhuluikan lebih memilih kata “*sekubu*” untuk menggantikan istilah “*satu kelompok*”. Lalu, “*bajingan*” pada *tweet* pertama awalnya memang istilah yang muncul di tanah Jawa untuk menunjuk seorang pengendara (sopir) gerobak sapi. Namun, istilah ini seolah adanya pergeseran makna, membuat istilah *bajingan* menjadi sebuah kata makian. Adapun, “*bajingan*” setara dengan “*sialan*” karena kedua kata itu memiliki arti yang sama. Namun, ia lebih memilih menggunakan kata “*bajingan*” agar lebih terkesan kejam, kasar dan mengutuk hingga membuat para politisi utamanya yang menjadi bagian dari @Gerindra merasa kian tersudut.



Gambar 5.26 Teks yang diproduksi oleh @ubedasy

Tak hanya itu @ubedasy juga mencuitkan *'belegug'*: Adapun, beberapa pilihan kata yang dipakai oleh @ubedasy seperti *blegug*, adalah suatu kata kasar dari Jawa Barat, yang artinya bodoh, bego, bodoh, atau dungu. Lalu, kata bebal, sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti bebal adalah sukar mengerti atau tidak cepat menanggapi sesuatu (tidak tajam pikiran).



Gambar 5.27 Teks yang diproduksi oleh @xELonjoran

Tweet ketiga diwakili dengan klesluruhan kalimat milik @xELonjoran “*gol bunuh diri 2024*”. Bagi peneliti, pemilihan frasa ini “*gol bunuh diri*” dimaksudkan untuk menggambarkan momen ketika partai politik Gerindra sengaja memberikan umpan dari blunder yang di buat. Dalam hal ini, tanggapan yang disampaikan @Gerindra termasuk dalam blunder yang dapat mencoreng citra baik, hingga berpengaruh pada kepemiluan mereka yang memungkinkan mereka tidak mendapatkan suara dan ini akan menguntungkan pihak lawan.

5.4 Retoris

Elemen ini merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditekankankan atau ditonjolkan (yang berarti dianggap penting) oleh seseorang yang dapat diamati dari teks. Misalnya, penggunaan tanda seru pada tulisan “*what’s up*” sebagai “*WHAZUUP!!!*” sesuai dengan intonasi dan volume verbal ini. Ejaan alternatif juga dapat menghidupkan suatu aksen atau dialek tertentu.

Holcomb (2013) telah mempelajari ketika terjadi cuitan maka itu menjadi satu kesamaan dari perangkat animasi paralinguistik, yaitu mereka bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pembicara asli melafalkan suatu ucapan. Menurut

analisisnya, pergeseran huruf besar-kecil, tanda seru, hingga titik digunakan untuk memdramatisasi emosi dan sikap baik *tweet*.

Lalu, pengulangan huruf menunjukkan pemanjangan huruf vokal. Spasi tambahan dalam satu kata menekankan pengucapan yang berlarut-larut, dan tidak adanya spasi menciptakan efek produksi lisan yang cepat dan kacau. Hal ini juga menunjukkan aspek interaksi sosio-emosional. Misalnya dengan penggunaan tanda seru dan tanda tanya berulang dapat meningkatkan seberapa besar ketertarikan atau kepedulian warganet pada suatu hal.



Gambar 5.28 Teks yang diproduksi oleh @arzuhi

Akun @arzuhi mencuitkan, “*Woy..tu ga sesederhana itu @Gerindra!! Tu ada human trafficking...dan pemeriksaan anak di bawah umur...lu seenaknya jidat jawab kayak gitu...dimana hati nurani lu min @Gerindra????*”. Pada cuitan pertama tanda seru banyak digunakan untuk membentak perilaku @Gerindra. Peneliti berpendapat makna dari teks tersebut bahwa @Gerindra dinilai tidak punya rasa simpati simpati kepada korban. Kemudian, penggunaan titik-titik digunakan oleh pemilik cuitan seolah menghela nafas panjang sebagai ekspresi kekecewaan. Dilanjutkan pada tanda baca yang diikuti dengan tanda tanya bermaksud untuk mendesak jawaban dari @Gerindra atas pertanyaannya.



Gambar 5.30 Teks yang diproduksi oleh @yuzar_iqbal

Tak hanya itu, akun @yuzar_iqbal Tak hanya itu, beberapa warganet melakukan sindiran keras, seperti yang dilakukan oleh @yuzar_iqbal, “*keluarganya pasti tau min @gerindra, tolonglah cari!!! proses hukum!!! Jangan damai sini sono dulu Disekap bosku, kejahatan manusia bos. Bapaknya anggota DPRD lagi ckckck,*” dan @ceutou yang menuliskan “*MANA EMPATINYA???*” menunjukkan bahwa kedua cuitan mengandung ekspresi desakan dan kecaman terhadap Gerindra.



Gambar 5.31 Teks yang diproduksi oleh @glenfriendly

Hal yang menarik juga didapatkan dari tweet kedua milik @glenfriendly, di mana, “*ckckck*” yang dilengkapi dengan titik-titik, mengungkapkan kekesalan/kejengkelan (*irritation*). Penggunaan *emoticon* bisa menjadi bentuk grafis yang masih masuk dalam kategori retorik. Penamaan *emoticon hear no-evil* pada cuitannya punya arti asli yang berarti tidak mendengar yang jahat. Namun, *emoticon* saat ini mengalami pergeseran makna, utamanya di media sosial. Kini, *emoticon* tersebut lebih sering digunakan untuk menyindir dan diartikan sebagai rasa heran dan

saya tidak percaya apa yang saya dengar. Dengan begitu, ada makna yang terlihat bahwa warganet @glenfriendly tidak percaya dengan apa yang dilakukan Gerindra karena menganggap kasus ini bukan ranah partai dan partai politik hanya menjadi penonton saja. Tak hanya itu, di beberapa akun twitter lainnya pun di temukan *emoticon* serupa, seperti *emoticon* tertawa, jatuh cinta dan tersenyum. Ini menjadi tanda bahwa cuitan yang mereka buat bernada sarkas.



Gambar 5.32 Teks yang diproduksi oleh @bugiloljare

Tweet ketiga milik @bugiloljare terdapat banyak sekali pengulangan huruf menunjukkan pemanjangan huruf vocal, seperti “*waaahhhhh mbak iki keren puollll*”.Namun, selanjutnya pemilik akun @bugiloljare menulis *kalimat* “*aku jadi bingung???*” seolah menjadi ekspresi dan bentuk kebingungan yang disambut kekecewaannya atas pengharapan yang disimbolkan oleh tanda tanya yang banyak.



Gambar 5.33 Teks yang diproduksi oleh @ketabrakodong2

Tweet lainnya berasal dari @ketabrakodong2 membalas di antara banyaknya reply dengan penggunaan format dialog. Cuitan tersebut pun terkesan menyindir dengan menekankan kalimat “YNKTS!!”. Perlu diketahui, bahwa YNKTS adalah singkatan dari “*ya ndak tahu kok tanya saya*”. Ungkapan itu ada, ketika Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, lebih tepatnya pada September 2013. Video itu direkam ketika Jokowi mendapat serbuan pertanyaan dari wartawan. Saat itu pula Jokowi disebut punya jurus baru untuk menghindar dari serbuan wartawan dengan pura-pura mengelabui pers.



Gambar 5.34 Teks yang diproduksi oleh @yoppppppp_

Sementara, soal grafis akun @yoppppppp_ menggunakan grafis berupa meme, di mana dia coba mengilustrasikan kepanikan yang sedang melanda admin @Gerindra, karena pembicaraan yang makin menyudutkan partai politik Gerindra. Padahal, tugas admin hanya melakukan interaksi dengan warganet, bukan yang mengambil keputusan, tapi warganet seakan tidak peduli dan menuntut admin mengambil tindakan secara cepat dalam hal pemerkosaan, padahal itu bukanlah tugasnya.



Gambar 5.35 Teks yang diproduksi oleh @Tya519

Tak hanya itu, akun @Tya519 memberikan meme seorang anggota dewan, yakni Ibu Hajar Tanjung yang juga merupakan orang tua dari sang pelaku pemerkosaan, Amri Tanjung sedang lelap tertidur. Fotonya menjadi viral pada 2019 silam, di mana dia tertidur saat pelantikan tepatnya ketika Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sedang berpidato ketika pelantikan Anggota DPRD Kota Bekasi. Tampak IHT panggilan akrabnya, tertidur dengan posisi kepala mendongak ke atas dan mulut agak terbuka. Hal ini seakan ingin memperlihatkan bagaimana kualitas para kader dari partai politik Gerindra, di mana salah satunya yakni Ibnu Hajar Tanjung seorang

anggota DPRD dari Gerindra tertidur pulas saat pelantikan. Meme ini mendapat banyak reaksi, yakni 47 *likes* dengan 5 *retweets*.



Gambar 5.36 Teks yang diproduksi oleh @randimayanto

Terakhir dari @randimayanto yang mengunggah Give Up GIF, sebuah meme dengan reaksi menyerah atau pasrah. Ini terlihat dengan diangkatnya kedua tangan. Unggahannya ini bernada sindiran, sebab mimik wajahnya terlihat mengejek. *Graphics Interchange Format* (GIF) sendiri merupakan format grafis yang paling sering digunakan untuk keperluan desain website. GIF memiliki kombinasi warna lebih sedikit dibanding JPEG, tetapi mampu menyimpan grafis dengan latar belakang transparan ataupun dalam bentuk animasi sederhana.

5.5 Konteks Sosial

Konteks sosial adalah dimensi dari analisis wacana oleh Teun A. Van yang menjelaskan soal wacana yang berkembang dalam masyarakat dan bagaimana suatu hal dikonstruksi dalam masyarakat. Maka, pada penelitian ini konteks sosialnya adalah interaksi antar penutur/warganet.

Berdasarkan pantauan peneliti perlu diketahui bahwa akun @Gerindra dapat mengunggah kultwit atau kicauan berseri untuk menjelaskan suatu hal, bahkan hingga sebanyak 20-30 kicauan. Dari kicauan-kicauan tersebut, *followers* dapat merespons beberapa di antaranya untuk sekadar menanggapi ataupun bertanya. Sebaliknya, admin @Gerindra dapat langsung merespons kembali pertanyaan dari *followers* secara personal. Interaksi antara admin @Gerindra dengan followers ini bisa terjadi hingga 6-7 kali respons, sehingga hal yang ditanyakan dapat dijawab dengan detail oleh admin dan @Gerindra berusaha untuk terus melibatkan pengguna lain dalam berkomunikasi, sehingga interaksi tetap terjaga.

Kemudian, hal yang membedakan @Gerindra hingga bisa menampilkan interaksi yang bagus, sebab partai ini nampak tidak monoton, dibanding dengan akun-akun resmi berbasis politik di media sosial kerap menyampaikan berbagai unggahan berbau politik saja. Namun, segala prestasi yang dibangun rusak menjadi akibat satu tanggapan guna menangkis *bad news* yang menerpa partai politiknya. Ini disebabkan pertanyaan dari salah satu follower tentang perkembangan kasus pemerkosaan terhadap remaja di bawah umur yang melibatkan anak anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Gerindra sebagai pelaku.

Kasus pemerkosaan tersebut menjadi sangat ramai diperbincangkan salah satunya karena adanya wacana untuk menikahkan korban dengan pelaku. Lengkapnya, saat @Gerindra ditanya pendapatnya terkait kasus tersebut, akun @Gerindra pun menjawab dengan cuitan "*Anaknya bukan Kader, Kak*" dan "*Semua kembali lagi kepada keluarga korban. Apakah ingin melanjutkan kasus ini secara hukum atau mengambil langkah atau pilihan lain.*" Begitu tulis akun Gerindra. Jawaban tersebut tentu saja secara tidak langsung melihat pernikahan sebagai solusi bagi orang yang disangka memerkosa dan korbannya dan itu tentunya memancing reaksi yang keras dari warganet.

Apabila diamati lagi, sesuai dengan banyaknya balasan terhadap @Gerindra, hasil dari pengumpulan data menyebutkan bahwa warganet dominan tidak setuju atas sikap @Gerindra. Bagi warganet, kalimat "*Semua kembali lagi kepada keluarga*

korban” atau *tweet* tidak bisa mengambil posisi yang lebih simpati kepada korban bahkan tidak menunjukkan keberpihakan pada korban. Partai harus menyadari betul kalau perkosaan seharusnya dihukum, dan tak akan selesai dengan pernyataan seperti *“kembali kepada keluarga”* agar hal tersebut tidak terjadi pada ranah yang lebih luas. Pernyataan seperti menikahkan korban bisa dianggap sebagai upaya dekriminialisasi yang sama sekali tak boleh mereka dukung.

Menurut Abdullah (2001) adanya sikap ketidakberpihakan, makin menjawab dugaan bahwa pernyataan Gerindra memang masih menampilkan adanya bias gender yang sesuai dengan penilaian warganet. Padahal, menikahkan korban dengan pelaku berpotensi menimbulkan kekerasan yang berulang bagi korban, baik secara emosional, fisik, maupun seksual, serta merampas hak korban untuk memulihkan dirinya. Menikahkan korban dengan pelaku justru bertentangan dengan konsep keadilan restoratif karena tidak menghadirkan keadilan dan kepastian hukum yang muncul melalui proses hukum. Bahkan, jalan pintas ini cenderung tidak memberi ruang dialog antara kedua pihak sehingga membungkam suara korban.

Alih-alih mendapatkan perlindungan, korban justru harus berhadapan setiap hari dengan orang yang sudah memunculkan trauma dalam hidupnya. Satu-satunya solusi dalam kasus semacam ini, ya, selesaikan saja melalui jalur hukum meski hukum belum tentu juga berpihak pada korban karena keterbatasan aturan yang ada sekarang. Bias dalam perspektif gender merupakan pemihakan terhadap salah satu pihak secara tidak adil. Menurut Rokhmansyah (2016) dalam bias gender terdapat posisi peran yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan yang diakibatkan adanya stereotip gender yang mengkotak-kotakan laki-laki dan perempuan dalam peran feminin dan maskulin.

Pernyataan yang diunggah oleh banyak warganet bernilai positif dengan menunjukkan atau memperjuangkan hak bagi perempuan untuk bisa mendapatkan keadilan. Pada akun @Gerindra yang punya interaktivitas tinggi menunjukkan bahwa telah banyak orang terpengaruh untuk mengecam partai politik tersebut tidak punya *sense of justice* dan *unlawful*.

Hal ini ditambah dengan fakta di bahwa pelaku AT (21) punya aspek kuasa, yakni anak dari kader Gerindra sehingga bagi warganet sang pelaku terkesan punya imun kebal terhadap sanksi hingga membuat jawaban @Gerindra tidak memberi sikap tegas dan hanya bersikap seperti penonton atas kasus yang menerpa kadernya. Dalam konteks relasi patriarki dan kuasa laki-laki narasi bias gender juga peneliti temukan dalam pemberitaan media online memuat berita tersebut. Salah satu isi pemberitaan mengatakan bahwa AT (21) sudah mangkir beberapa kali atas pemanggilan dalam penyidikan. Di sini, warganet pun kian membuktikan bahwa ada campur tangan orang tua dalam menyembunyikan anaknya yang merupakan pelaku pemerkosaan.

Setelah menganalisis komentar-komentar menggunakan analisis wacana model Teun A. Van Dijk telah diperoleh kesimpulan bahwa banyak dari warganet secara serius mengecam terhadap tanggapan akun @Gerindra. Peneliti menyimpulkan bahwa @Gerindra dikecam, disebabkan hasil pemaknaan teks oleh banyak warganet mengandung pelanggaran bias gender, inkonsisten terhadap program yang dicanangkan. Warganet merasa, bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan hingga hal ini sempat menyinggung urusan elektoral pada 2024.